

**PENGARUH PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
DI KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Administrasi Publik FIS UNP
sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh

RESFIANA
TM/NIM : 2015/15042065

PROGRAM STUDI
ADMINISTRASI PUBLIK

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan
Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar

Nama : Resfiana

Nim / TM : 15042065 / 2015

Program Studi : Administrasi Publik

Jurusan : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 24 April 2019

Disetujui oleh ;

Dosen Pembimbing



Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D.
NIP. 19630401198903 1 003

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang



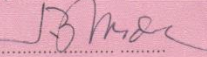
Pada hari Rabu, Tanggal 24 April 2019 Pukul 09.00 s/d 10.00 WIB

Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar

Nama : Resfiana
NIM : 15042065
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 24 April 2019

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua : Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D	1. 
2. Anggota : Zikri Alhadi S.IP, MA	2. 
3. Anggota : Adil Mubarak S.IP, M.Si	3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP


Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 1 198903 1002

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Resfiana
NIM/TM : 15042065
Tempat / Tanggal Lahir : Ambon / 12 Juni 1996
Program studi : Administrasi Publik
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul 'Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar' adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 24 April 2019

Yang membuat pernyataan



Restfiana

15042065/2015

ABSTRAK

Resfiana : Nim 2015/15042065 Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya indikasi bahwa kurangnya pengetahuan serta kemampuan para aparatur nagari dalam menerapkan teknologi informasi dalam proses pengelolaan keuangan nagari. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dari penelitian ini berjumlah 600 orang yang terdiri dari Wali Nagari, Sekrertaris, Bendahara dan lima Kepala Urusan Nagari dan sampelnya berjumlah 240 responden yang ditentukan berdasarkan rumus slovin dengan taraf signifikan 5% . Pengambilan sampel menggunakan teknik Multistage Random Sampling. Instrumen penelitian ini berbentuk kusioner dengan menggunakan pengukuran skala likert. Analisis penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sub variabel kemanfaatan berpengaruh signifikan terhadap pegelolaan keuangan nagari dengan hasil uji regresi nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,093, sub variabel kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan nagari dengan hasil uji regresi nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,071 dan secara bersama-sama sub variabel kemanfaatan dan kemudahan penggunaan berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah datar dengan hasil uji regresi nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,094.

Kata Kunci : Teknologi Informasi, Kinerja, dan Pengelolaan Keuangan Nagari

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar.** Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang secara integratif memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Aldri Frinaldi S.H, M.Hum, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi dan dosen pembimbing akademik
4. Bapak Zikri Alhadi S.IP, MA dan Bapak Adil Mubarak S.IP, M.Si selaku dosen penguji skripsi.
5. Bapak dan Ibuk Dosen staf pengajar pada jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
6. Staf karyawan/karyawati keputakaan dan staf administrasi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Bapak Bupati Tanah Datar yang telah memberikan izin untuk penelitian ini.

8. Bapak/Ibu Walinagari sekabupaten Tanah Datar beserta perangkat nagari yang telah berjasa memberikan izin pengumpulan data dan sekaligus pengisian data penelitian ini.
9. Teristimewa kepada kedua orang tua yaitu ayahanda Rusman dan ibunda Fitriati yang penulis cintai dan sayangi yang telah memberikan doa, dorongan serta semangat untuk terus menjadi anak yang berguna dan berprestasi serta selalu memberi semangat untuk dapat menyelesaikan penelitian ini.
10. Tersayang kepada ketiga saudara yaitu Nova Resfita S.T, M.Sc., Rusdi Ahmad dan Rahmi Novita yang penulis cintai dan sayangi yang selalu memberi masukan dan dorongan serta perhatiannya.
11. Rekan-rekan mahasiswa sepenelitian payung Pak Syamsir tahun 2018 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terimakasih atas saran-saran dan motivasinya.
12. Tersayang rekan-rekan grup Semarak Kicau yang penulis cintai terkhusus kepada KAWANKU terimakasih atas ide-ide, motivasi serta perhatiannya.
13. Tersayang saudara Khairani, S.AP, Rahmi Yanti S. AP dan Mutia Reni, S. AP terima kasih atas motivasi dan masukannya.
14. Rekan-rekan mahasiswa keluarga besar Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terimah kasih untuk ide-ide dan semangatnya
15. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Negeri Padang terima kasih untuk setiap ide, masukan dan dorongan dalam penyelesaian peneltian ini.

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dan relevan agar skripsi ini bisa

menjadi layak. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat yang positif untuk para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padang, April 2019

Penulis

Resfiana

DAFTAR ISI

Halaman Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
A. Konsep Pengelolaan Keuangan Nagari	10
B. Konsep Aparatur Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari	22
C. Teknologi Informasi.....	31
1. Pengertian Teknologi Informasi	31
2. Indikator Teknologi Informasi	38
D. Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kinerja	40
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu	43
F. Kerangka Konseptual	46
G. Hipotesis Penelitian ..	47
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	49
C. Lokasi Penelitian.....	52
D. Populasi dan Sampel Penelitian.....	53
E. Instrumen Penelitian.....	54
F. Jenis Teknik, dan Alat Pengumpulan Data.....	55
G. Uji Validitas dan Reabilitas.....	56

H. Teknik Analisis Data.....	60
BAB IV : HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum.....	66
B. Profil Responden.....	69
C. Temuan Khusus.....	76
D. Pembahasan.....	95
E. Keterbatasan Penelitian.....	99
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	102
Daftar Pustaka	103
Lampiran	107

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Aparatur Nagari di Kabupaten Tanah Datar.....	52
Tabel 3.2 Tabel Pengukuran Variabel.....	54
Tabel 3.3 Uji Validitas Variabel Teknologi Informasi.....	56
Tabel 3.4 Uji Validitas Variabel Pengelolaan Keuangan Nagari.....	57
Tabel 3.5 Tingkat Reliabilitas.....	58
Tabel 3.6 Uji Realibilitas Variabel Teknologi Informasi.....	59
Tabel 3.7 Uji Realibilitas Variabel Pengelolaan Keuangan.....	59
Tabel 4.1 Profil Responden menurut Klasifikasi Menurut Umur.....	64
Tabel 4.2 Profil Responden menurut Klasifikasi Menurut Jenis Kelamin.....	65
Tabel 4.3 Profil Responden menurut Klasifikasi Menurut Status Perkawinan.....	65
Tabel 4.4 Profil Responden menurut Klasifikasi Menurut Pendidikan Terakhir.....	66
Tabel 4.5 Profil Responden menurut Klasifikasi Menurut Jabatan.....	67
Tabel 4.6 Profil Responden menurut Klasifikasi Menurut Pendapatan Bersih.....	67
Tabel 4.7 Profil Responden menurut Klasifikasi Menurut Kontribusi Pendapatan Bersih.....	68
Tabel 4.8 Profil Responden menurut Klasifikasi Menurut Masa Kerja.....	69
Tabel 4.9 Deskripsi Variabel Kemanfaatan.....	70
Tabel 4.10 Deskripsi Variabel Kemudahan Penggunaan.....	71
Tabel 4.11 Deskripsi Variabel Teknologi Informasi.....	72
Tabel 4.12 Deskripsi Variabel Transparansi.....	73
Tabel 4.13 Deskripsi Variabel Akuntabilitas.....	74
Tabel 4.14 Deskripsi Variabel Partisipatif.....	75
Tabel 4.15 Deskripsi Variabel Disiplin dan Tertib Anggaran.....	76
Tabel 4.16 Deskripsi Variabel Pengelolaan Keuangan Nagari.....	77
Tabel 4.17 Hasil Kontribusi (R) Pengaruh Sub Variabel Kemanfaatan terhadap kinerja Aparatur Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari.....	78
Tabel 4.18 Hasil Uji Anova (F) Pengaruh Sub Variabel Kemanfaatan terhadap kinerja Aparatur Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari.....	79
Tabel 4.19 Hasil Uji (T) Pengaruh Sub Variabel Kemanfaatan terhadap kinerja Aparatur Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari.....	79
Tabel 4.20 Hasil Kontribusi (R) Pengaruh Sub Variabel Kemudahan Penggunaan terhadap kinerja Aparatur Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari.....	80
Tabel 4.21 Hasil Uji Anova (F) Pengaruh Sub Variabel Kemudahan Penggunaan terhadap kinerja Aparatur Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari.....	80
Tabel 4.22 Hasil Uji (T) Pengaruh Sub Variabel Kemudahan Penggunaan terhadap kinerja Aparatur Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari.....	81
Tabel 4.23 Hasil Uji Multikoleaniritas Pengaruh Teknologi Informasi (Kemanfaatan dan Kemudahan Penggunaan) terhadap kinerja Aparatur Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari	85

Tabel 4.24 Hasil Uji Autokorelasi Pengaruh Teknologi Informasi (Kemanfaatan dan Kemudahan Penggunaan) terhadap kinerja Aparatur Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari	86
Tabel 4.25 Hasil Kontribusi (R) Pengaruh Teknologi Informasi (Kemanfaatan dan Kemudahan Penggunaan) terhadap kinerja Aparatur Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari.....	87
Tabel 4.26 Hasil Uji Anova (F) Pengaruh Teknologi Informasi (Kemanfaatan dan Kemudahan Penggunaan) terhadap kinerja Aparatur Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	47
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Kabupaten Tanah Datar	63
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Aparatur Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari.....	82
Gambar 4.3 Hasil Uji Linearitas Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Aparatur Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari	83
Gambar 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Aparatur Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari	84
Gambar 4.5 Pengaruh Variabel X Terhadap Variabel Y	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan dikeluarkannya paket kebijakan otonomi daerah yang ditetapkan dengan UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 jo UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 dimana isi pokok dari undang-undang ini adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melakukan penataan kelembagaan dan personil serta melaksanakan pengaturan dan pengawasan fiskal secara otonom. Dengan demikian dapat dikatakan undang-undang ini membawa perubahan yang fundamental dalam hubungan tata pemerintahan dan tata keuangan, sekaligus membawa perubahan penting khususnya dalam pengelolaan keuangan di daerah.

Sejak lahirnya Undang-undang tentang Desa yang diundangkan pada 15 Januari 2014 yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 telah melahirkan rezim keuangan negara baru di tingkat Desa yakni dalam hal pengelolaan keuangan dan aset Desa, yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Desa. Merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari bahwa Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi *Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah* atau berdasarkan asal usul dana dat istiaat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dimana disini dijelaskan asas-asas pengelolaan keuangan desa/nagari yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa/nagari ialah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari yang disingkat PTPKD/PTPKN adalah unsur perangkat desa/nagari yang membantu Kepala Desa/Nagari untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa/nagari.

Sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* yaitu setiap pimpinan lembaga negara, kepala daerah diamanatkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya guna terlaksana pengembangan *e-government* secara nasional. Maka dalam upaya pengembangan *e-government* pemerintah berupaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam meningkatkan kualitas kerja. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa/nagari pada bidang pengelolaan keuangan nagari setiap aparatur berupaya untuk dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan *good governance* melalui

penyelenggaraan tugas yang transparan dan akuntabel salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan demikian dalam penerapan teknologi informasi para perangkat nagari dituntut agar mampu menggunakan teknologi sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Selanjutnya Selanjutnya merujuk berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 44 tahun 2017 tentang Visi Misi badan Keuangan Daerah bahwa terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparansi dan akuntabilitas melalui management yang baik dengan menggunakan teknologi informasi. Maka setiap aparatur berupaya untuk dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan *good governance* melalui penyelenggaraan tugas yang transparan dan akuntabel salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi

Namun pada kenyataan di lapangan, penulis mendapat informasi dari beberapa informan tentang para perangkat nagari yang belum mampu menggunakan teknologi. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal seperti faktor umur dari perangkat nagari yang membuat kurangnya pengetahuan para perangkat nagari tentang teknologi informasi dan kurangnya tenaga ahli dibidang teknologi informasi pada pengelolaan keuangan nagari. Hal ini di dukung dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu Wali Nagari yang ada di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar yaitu wali nagari Aia Angek pada tanggal 30 Mei 2018 :

“...kendala yang terjadi di nagari kami kurangnya jumlah SDM yang paham terhadap teknologi informasi dan fasilitas pendukungnya dan juga kurangnya ilmu pengetahuan dari SDM baik itu dari segi pengetahuan maupun pengelolaan keuangan, maka diharapkan adanya penambahan SDM yang berkualitas dan paham TI”.

Disisi lain juga terlihat para perangkat nagari yang kurang kompeten pada bidangnya. Di lain sisi terdapat perangkat nagari dengan posisi jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian kerja dibidangnya dan juga dalam hal ini terdapat aparatur perangkat nagari yang tidak mandiri dalam melakukan tugasnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu perangkat nagari di III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar pada 30 Mei 2018 :

“...disini masih kurang keterampilan akan perangkat-perangkat lunak khususnya pada posisi bendahara, bendahara kurang dalam penguasaan komputer, maka sangat diharapkan posisi bendahara hendaknya yang harus siap pakai dan penguasaan terhadap keuangan dan komputer. Selain bendahara perangkat nagari yang lain juga kurang pengetahuannya dan pemahamannya terhadap IPTEK maka juga diharapkan adanya pelatihan untuk perangkat nagari yang paham IPTEK dan berkualitas”.

Selain itu juga terlihat masih kurangnya fasilitas pendukung dalam pengelolaan keuangan nagari, contohnya kurang tersedianya jaringan internet yang memadai dan kurangnya jumlah komputer yang layak untuk digunakan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Wali Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 03 September 2018 :

“...kendala yang kami rasakan saat ini adalah kurangnya fasilitas pendukung nagari seperti tersedianya jaringan WIFI. Sistem keuangan nagari berbasis aplikasi menuntut untuk ketersediaan wifi yang baik dan lancar dalam proses input data keuangan nagari. Wifi tidak hanya digunakan untuk proses input data namun juga dalam pengoperasian website nagari dan apabila website nagari berjalan maka dibutuhkan admin yang mampu untuk menjalankan website nagari”.

Menurut Sutabri (2014) teknologi informasi adalah suatu proses yang dilakukan secara elektronik dimana mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas. Selanjutnya menurut Kadir

dan Triwahyuni (2003) teknologi informasi merupakan seperangkat alat yang membantu seseorang dalam bekerja dengan informasi dan dapat melakukan berbagai tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Maka di sini teknologi informasi sangat berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas yang mana dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas kerja seseorang menjadi lebih efisien dan efektif.

Sementara menurut Sulityo (1998) dengan adanya teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dapat meningkatkan produktifitas pekerja, meningkatkan kecermatan pekerjaan agar hasil informasi yang dihasilkan lebih cepat dan akurat. Salah satu teknologi informasi yang digunakan adalah komputer. Komputer mampu meningkatkan nilai pekerjaan karena banyak staff kantor kini memiliki tugas yang lebih nyaman dan lebih menyenangkan berkat kemudahannya dan juga lebih banyak memiliki tanggung jawab dan aktifitas yang lebih luas.

Penerapan teknologi informasi dapat mendukung berbagai kebutuhan dan perkembangan organisasi, individu dan perusahaan yang mana akan mendatangkan sesuatu hal yang positif. Namun dalam penerapan teknologi informasi dapat membuat seseorang menjadi insan yang lebih berarti apabila dapat memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif. Berbagai literatur pun banyak bermunculan mengenai faktor-faktor yang dikaitkan dengan pengaruh penerapan teknologi informasi bagi para pekerja. Salah satu teori yang menjelaskan tentang perilaku penggunaan dan penerimaan dari sistem teknologi informasi adalah model *Technology Acceptence Model* (TAM). Model ini pertama kali dikembangkan oleh Fred Davis pada tahun 1989. *Technology Acceptence Model*

(TAM) adalah salah satu model yang dibuat untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi informasi. Model *Technology Acceptance Model* (TAM) memperkenalkan 2 konstruk kunci yaitu kemanfaatan (*usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*ease of use*) yang memiliki relevancy dalam memprediksi sikap penerimaan penggunaan teknologi informasi (Davis, 2000).

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar”**. Dimana hal ini dilakukan agar penulis mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh kemanfaatan (*usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*ease of use*) penggunaan teknologi informasi terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini merupakan inti sari dari hasil penelitian skripsi serta merupakan bagian dari penelitian payung Syamsir (2017) yang berjudul Model Pembinaan Aparatur Pemerintahan Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.

B. Identifikasi Masalah

1. Kurangnya pengetahuan para perangkat nagari tentang penerapan teknologi informasi
2. Masih terdapat aparatur perangkat nagari yang tidak mandiri menyelesaikan pekerjaan dalam pengelolaan keuangan nagari.
3. Kurangnya kesadaran pegawai untuk meningkatkan kompetensinya pada bidang pengelolaan keuangan nagari

4. Kurangnya fasilitas dalam pengelolaan keuangan nagari seperti jumlah komputer yang layak untuk digunakan.
5. Kurang efektifnya penggunaan teknologi informasi pada bidang pengelolaan keuangan nagari
6. Terdapat perangkat nagari dengan posisi jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian kerja dibidangnya.

C. Batasan Masalah

Dari uraian ini penulis tidak akan membahas seluruh permasalahan yang ada, maka dari itu ada pembatasan masalah yang akan diteliti sehingga lebih terarah dan tidak terlalu luas. Dalam penelitian ini masalah yang diteliti dibatasi pada :

1. Pengaruh kemanfaatan (*usefulness*) penerapan teknologi informasi terhadap pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar
2. Pengaruh kemudahan penggunaan (*ease of use*) teknologi informasi terhadap pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar.
3. Pengaruh kemanfaatan (*usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*ease of use*) teknologi informasi terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka perumusan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh kemanfaatan (*usefulness*) penerapan teknologi informasi terhadap pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar?
2. Apakah terdapat pengaruh kemudahan penggunaan (*ease of use*) teknologi informasi terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar?
3. Apakah terdapat pengaruh kemanfaatan (*usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*ease of use*) teknologi informasi terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh kemanfaatan (*usefulness*) penerapan teknologi informasi terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar
2. Pengaruh kemudahan penggunaan (*ease of use*) teknologi informasi terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar
3. Pengaruh kemanfaatan (*usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*ease of use*) teknologi informasi terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, secara praktis dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.
- b. Bagi pemerintah, sebagai masukan atau sumbangan pemikiran dan sumber informasi bagi Pemerintah dalam meningkatkan kinerja.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan yang terkait dengan Ilmu Administrasi Negara khususnya mata kuliah Administrasi Keuangan Publik, Sistem Informasi Manajemen (SIM), Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dan Pemerintahan Nagari.